



Strategi Kebijakan Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi

Prayogi Catur Pamungkas¹, Haura Atthahara², Sopyan Resmana Adiarso³

^{1, 2, 3} Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author: prayogicaturpamungkas@gmail.com

Article Info

Abstract

Received:

2024-07-12

Revised:

2024-10-15

Accepted:

2024-12-02

Keywords:

Religious
Harmony;
Tolerance;
Strengthening

Religion can be a unifying tool for the nation of Indonesia through the first principle of Pancasila as its foundation. Religious harmony certainly has a positive impact on the surrounding environment, especially in Bekasi City, which won an award with a tolerant city given by the equivalent institute in 2023. The purpose of this study is to explore the government's policy strategy for strengthening religious harmony in Bekasi City. This research is important to see how the tolerant city of Bekasi City was created so that this research provides insight into public policy in terms of strengthening evidence-based religious communities. This research uses a qualitative approach with a research method design using case studies. Data was collected through direct observation, interviews, archival recordings, and documentation. The results showed that the policy strategy adopted by the Bekasi City Government is multicultural education socialized through social organizations, promotion of interfaith dialogue, and facilitation of activities to strengthen religious harmony.

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan sehingga terwujud stabilitas sebuah negara. Keberagaman di Indonesia menghadirkan agama-agama besar yang secara konstitusi negara telah diakui, agama-agama tersebut meliputi: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut berhak mendapat perlindungan dari negara. Hal ini sudah tercantum pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Melihat negara Indonesia adalah negara yang beragam dari sisi agama dan bukan sebagai negara agama tertentu maka agama di Indonesia merupakan hal yang sangat penting serta tidak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu agar terciptanya kemajuan bangsa yang bersatu dan bermartabat, dapat dilakukan dengan cara memperkuat kerukunan umat beragama (Chudzaifah et al., 2022).

Keragaman penduduk dianggap menjadi salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Keragaman pada latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat mempengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota. Hasil scoring Indeks Kota Toleran 2023 untuk 10 (sepuluh) kota skor toleransi terendah sebagai berikut.



Tabel 1. Daftar Kota Intoleran

No.	Nama Kota	Skor Akhir
1.	Depok	4,010
2.	Cilegon	4,193
3.	Banda Aceh	4,260
4.	Padang	4,297
5.	Lhokseumawe	4,377
6.	Mataram	4,387
7.	Pekanbaru	4,420
8.	Palembang	4,433
9.	Bandar Lampung	4,450
10.	Sabang	4,457

Sumber: Setara Institute, 2023

Kota dengan toleransi terendah memiliki kecenderungan terhadap favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan berpengaruh terhadap terbentuknya peraturan-peraturan yang berbasis agama. Peraturan berbasis agama tentu akan menjadi pemicu adanya tindakan diskriminatif. Adanya kebijakan-kebijakan seperti ini dapat dilihat dalam bentuk perintah atau kewajiban untuk menggunakan identitas keagamaan tertentu dalam berpakaian di sektor pendidikan maupun pemerintahan, kewajiban pelaksanaan ibadah tertentu oleh pemerintah kota. Implementasi kebijakan tersebut nyata-nyata mengakibatkan hak-hak kelompok minoritas teramputasi, terutama hak untuk menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya (Yosarie et al., 2023).

Kerukunan yang didasarkan kepada rasa toleransi yang tinggi di tengah masyarakat yang memiliki banyak perbedaan sangatlah dibutuhkan, hal tersebut menjadi solusi untuk menghindari konflik yang mengancam kesatuan di masyarakat. Berbagai elemen sangat mempengaruhi dan memiliki peran pentingnya masing-masing. Seperti kota Bekasi contohnya, Kota Bekasi berhasil meraih penghargaan Indeks Kota Toleran tahun 2023 pada peringkat kedua dari 94 Kota se-Indonesia. Bentuk penghargaan ini adalah hasil dari kerjasama dari semua elemen yang ada di Kota Bekasi, penghargaan ini untuk Warga Kota Bekasi dengan bentuk Toleransi tinggi sesama manusia.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota besar yang ada di Provinsi Jawa Barat. Letaknya yang berada di dekat DKI Jakarta menjadikan Bekasi sebagai kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan, Kota Bekasi kini menjadi sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Kota Bekasi juga menjadi daya tarik bagi para pendatang dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan ataupun untuk menetap. Kota Bekasi menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (Renaldiansyah dalam Hilal, 2022). Banyaknya pendatang yang datang ke kota Bekasi, membuat tingkat kemajemukan suku, budaya hingga agama menjadi semakin tinggi. Kota Bekasi pada semester 1 tahun 2023 memiliki penduduk beragama Islam berjumlah 2.214.856 (88,73%) jiwa, Kristen 190.360 (7,63%) jiwa, Katolik 64,292 (2,58%) jiwa, Hindu 4.086 (0,16%) jiwa, Buddha 21.963 (0,88%) jiwa, dan Konghucu sebanyak 131 (0,01%) jiwa (Disdukcapil Kota Bekasi, 2021). Dari data tersebut membuktikan karakteristik kota Bekasi yang multireligius dan dapat menjadi faktor terjadinya gesekan di masyarakat akibat adanya perbedaan tersebut (Hilal, 2022).

Kota Bekasi menerima penghargaan sebagai kota paling toleran kedua yang telah dikeluarkan oleh Setara Institute. Hal ini menarik bagi peneliti untuk menggali bagaimana strategi pemerintah Kota Bekasi dalam menguatkan kerukunan umat beragama. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui dinas yang terkait yang dalam hal ini diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Bekasi sebagai representasi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 57.B Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi untuk menciptakan kerukunan umat beragama sehingga Kota Bekasi dinilai menjadi Kota Toleran dan mendapatkan penghargaan secara nasional.

Penelitian mengenai strategi kebijakan penguatan kerukunan umat beragama ini akan peneliti lakukan dengan menggunakan perspektif kelembagaan atau institusionalisme. Perspektif Institusionalisme merupakan kerangka analisis dalam ilmu sosial yang menyoroti peran, struktur, dan interaksi lembaga-lembaga sosial dalam membentuk dan memengaruhi perilaku individu serta dinamika sosial dalam masyarakat. Karakteristik perspektif institusional, yakni pemerintah memainkan peran aktif, membutuhkan pembentukan organisasi formal yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi berbagai pendekatan strategi yang berbeda, mempromosikan pluralisme dan mengakomodasi beragam keyakinan yang ada (Midgley James, 1995). Perspektif ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial memiliki peran penting dalam membentuk norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial yang mengatur interaksi sosial. Melalui perspektif institusionalisme ini peneliti berupaya mengeksplorasi strategi-strategi pemerintah Kota Bekasi menciptakan kerukunan umat beragama. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana kota toleran yang disandang oleh Kota Bekasi diciptakan sehingga penelitian ini memberikan wawasan mengenai kebijakan publik dalam hal penguatan umat beragama berbasis bukti dan memberikan implikasi penelitian berupa promosi kebijakan publik (*best practice*) yang bisa diadopsi oleh daerah lain untuk menciptakan kondisi yang sama dengan juga mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam pengadaptasiannya.

LITERATURE REVIEW

Dalam suatu penelitian perlu membahas mengenai penelitian terdahulu yang mungkin memiliki pembahasan yang kurang lebih sama dengan penelitian ini, dengan hal ini maka bukan bermaksud untuk meniru hasil penelitian terdahulu, namun digunakan sebagai upaya dalam menambah wawasan, serta menemukan informasi yang sudah ada, sehingga tinjauan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan serta berfokus kepada hal-hal baru yang akan dilakukan oleh peneliti, kepada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam penguatan kerukunan umat beragama. Adapun kebaruan pada penelitian kali ini adalah pada penggunaan konsep teori, penulis juga menggunakan perspektif institusional terhadap penguatan kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, selain itu pada penelitian kali ini kebaruan pada tempat penelitian dan juga peran pemerintahan daerah. Adapun kesamaan dalam penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penggunaan metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif. Selain itu pada penelitian kali ini untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam penguatan kerukunan umat beragama di kota Bekasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode penelitian studi kasus. Jenis studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal, karena sebuah kasus yang dipilih merupakan kasus umum yang bertujuan untuk memberikan informasi dan penemuan dari kondisi sehari-hari dalam proses sosial untuk kepentingan teoritis. Kemudian penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*) adalah penelitian studi kasus yang

dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian (Creswell, 1998). Studi kasus jenis ini peneliti gunakan karena karakteristik yang dimiliki studi kasus cocok digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu studi kasus merupakan strategi yang cocok apabila pokok pertanyaan dari suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit ruang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena masa kini di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1987). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, dan perangkat fisik, sedangkan partisipan dalam penelitian ini diambil melalui pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penguatan kerukunan beragama di Kota Bekasi dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan penjodohan pola dengan membandingkan konsep yang dipakai dengan peristiwa yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil Pengumpulan data dan analisa data yang peneliti lakukan diketahui strategi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah sebagai berikut :

Pendidikan Multikultural

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan berperan aktif memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat. Keterlibatan ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, melatih individu, kelompok dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penguatan kerukunan umat beragama. Strategi pendidikan multicultural ini dilakukan melalui pembekalan kepada organisasi-organisasi masyarakat mengenai pemahaman program yang dilakukan pemerintah untuk penguatan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Melalui strategi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis bersama antara pemerintah dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi, sebagaimana diungkapkan oleh partisipan penelitian P1 pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

“Melalui kegiatan-kegiatan ini menurut saya Kesbangpol menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga atau merawat kerukunan beragama di Kota Bekasi, melalui kegiatan ini saya jadi mengetahui banyak hal baru mengenai kondisi kerukunan beragama di bekasi dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan. Saat tergabung dalam kegiatan ini tentu saja saya jadi mengetahui hal yang sedang diupayakan oleh Kesbangpol dan FKUB, mereka bersama-sama berupaya dalam penguatan kerukunan beragama di Kota Bekasi”. (P1)

Adanya strategi pendidikan multikultural yang dilakukan melalui pemberdayaan organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan terjadi transfer pengetahuan dan pemahaman pentingnya kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

Promosi Dialog Antar Agama

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan interaksi dengan lembaga-lembaga di masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh partisipan penelitian P2 saat di wawancarai yang menyampaikan,

“Kami seringkali menghadiri berbagai acara sebagai perwakilan dari pemerintah daerah Kota Bekasi, melalui acara-acara tersebut kami selalu berupaya memperkenalkan program/kegiatan yang kami lakukan, selain itu kami mengharapkan dukungan yang lebih luas dari pihak lain, membuka jaringan, mengembangkan hubungan dengan pihak dan kelompok, sehingga dapat bersama-sama mewujudkan tujuan bersama”.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini melakukan strategi pengembangan jaringan sosial dan sinergitas kelembagaan melalui kegiatan dialog dengan organisasi sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Sebagai perwakilan pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi masyarakat, seperti kegiatan penguatan kerukunan beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi unsur penting dalam membantu Walikota untuk menyampaikan seluruh programnya untuk bersama-sama mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam menjaga kedamaian di Kota Bekasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memberikan sambutan berupa materi disetiap kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk memperkuat toleransi umat beragama.

Fasilitasi Kegiatan Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

Strategi fasilitasi ini dilakukan untuk memfasilitasi, memperkuat, memberikan rekognisi dan apresiasi atas kontribusi yang diberikan oleh individu dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melakukan strategi fasilitasi ini dengan melakukan pemberdayaan tidak hanya pada tataran pengetahuan dan pemahaman tetapi juga pemberdayaan melalui pemberian daya berupa dukungan material dan dukungan teknis, seperti diantaranya yaitu memberikan dukungan finansial kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Umat Beragama (MUB), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dari tingkat Kota hingga kelurahan.

Selain dukungan finansial, Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan dukungan teknis berupa pada penggunaan teknologi dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bekasi. Dukungan teknis ini lebih menitikberatkan pada fasilitasi sumber daya yang dimiliki oleh Kesbangpol untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Partisipan penelitian P2 mengungkapkan :

“Kami selalu menyimpan seluruh data di komputer, selain itu juga kami menyimpan berkas dengan rapih, itu sebagai bentuk kesiapan kami apabila sewaktu-waktu data atau berkas tersebut dibutuhkan. Selain itu sebagai bentuk persiapan kami dalam menunjang kebutuhan di setiap kegiatan kami sudah memiliki peralatan yang cukup lengkap, sehingga saat kegiatan tidak perlu mencari alat yang diperlukan. Selain itu juga kami sudah menyediakan media sosial terkait dokumentasi kegiatan-kegiatan kami, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung akses ke media sosial kami”. (P2)

Dukungan teknis yang ditunjukkan dengan kesiapan secara teknik oleh Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ikut mempengaruhi keberhasilan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bekasi dalam rangka menjalankan strategi kebijakan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh partisipan penelitian P3 sebagai peserta dari kegiatan yang diadakan oleh Kesbangpol Kota Bekasi saat diwawancarai oleh peneliti, P3 mengungkapkan sebagai berikut:

“Berdasarkan yang saya lihat tidak ada sih, mereka mempersiapkannya dengan baik, mereka juga memperhatikan kenyamanan dari seluruh peserta kegiatan-kegiatan. Menurut saya juga seluruh peserta memiliki cara pandang yang sama dalam penguatan kerukunan beragama”.

Dari informasi tersebut juga menegaskan kembali bahwa fasilitasi sumber daya dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik ikut mempengaruhi keberhasilan strategi kebijakan yang

dijalankan sebagaimana telah diungkapkan bahwa sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik selain aspek lainnya seperti komunikasi, struktur birokrasi, konten kebijakan (Edward III, 1980; Grindle, 1980). Dengan demikian, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun strategi kebijakan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi dengan melakukan strategi kebijakan berupa pendidikan multikultural yang disosialisasikan melalui organisasi sosial kemasyarakatan, promosi dialog antar agama dan fasilitasi kegiatan penguatan kerukunan umat beragama. Strategi kebijakan ini saling terkait satu sama lain yakni saling mendukung. Strategi pendidikan multikultural dan dialog antar umat beragama tidak dapat dilaksanakan secara optimal jika strategi fasilitasi tidak disusun dan dijalankan oleh Kesbangpol Kota Bekasi. Begitu juga strategi pendidikan multicultural tidak dapat optimal dijalankan ketika strategi pendidikan multikultural dan strategi fasilitasi penguatan kerukunan umat beragama tidak ada. Dan dialog antar agama dapat berjalan jika strategi pendidikan multicultural yang menekankan pada penyebaran pengetahuan dan pemahaman pentingnya kerukunan umat beragama dan fasilitasi oleh Kesbangpol tidak ada atau tidak dijalankan. Hal ini menegaskan bahwa strategi kebijakan untuk menuntaskan suatu masalah publik tidak dapat berdiri sendiri tetapi terkait satu sama lain sehingga dalam penyusunan strategi kebijakan perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif.

KESIMPULAN

Kerukunan umat beragama di Kota Bekasi diciptakan melalui strategi kebijakan penguatan kerukunan umat beragama yang terdiri dari strategi pendidikan multikultural yang disosialisasikan melalui organisasi sosial kemasyarakatan, strategi promosi dialog antar agama dan strategi fasilitasi kegiatan penguatan kerukunan umat beragama. Ketiga strategi tersebut saling terkait satu sama lain dan dijalankan secara bersama-sama sehingga kondisi yang menjadi pondasi kehidupan yang rukun umat beragama dapat direalisasikan.

REFERENCE

- Chudzaifah, I., Hikmah, A. N., Tarbiyah, F., & Sorong, I. (2022). Moderasi Agama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49-56.
<http://jurnal.tarbiyah.stainsorong.ac.id/index.php/al-fikr>
- Hilal, N. (2022). *Kata Kunci: kerukunan beragama, patron klien, politik lokal*.
<https://repository.upnvj.ac.id/20469/4/BAB%20I.pdf>
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H., & Hasani, I. (2023). *Indeks Kota Toleran TAHUN 2023 PENULIS Indeks Kota Toleran*. www.setara-institute.org
- Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. In *Qualitative Health Research* (Vol. 9, Issue 5).
- Midgley James. (1995). *Social Development*. SAGE Publications Ltd.
- Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus Desain & Metode*.
- Edward III, G. G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1st ed.). Princeton: Princeton University Press.

